

Surat Kabar : Koran Tempo
Subyek : TPST Ciangir

Edisi : 11-Agus-2011
Halaman : D2

DKI Batalkan Rencana TPST Ciangir

Tak akan ada tempat pengelolaan sampah di Kabupaten Tangerang.

Rencana pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, akhirnya dibatalkan. "Kami berfokus mengolah sampah dalam kota," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balai Kota kemarin. Namun Fauzi menolak tawaran Pemerintah Kabupaten Tangerang menukar guling bidang tanah yang dimilikinya di Ciangir itu dengan bidang tanah lain di Jatiwaringin. Peruntukan lahan seluas 96 hektare itu justru dipersilakan digunakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Tangerang. "Kalau memang peruntukannya untuk permukiman, jadikan itu permukiman yang dikelola BUMD."

Sebelumnya, Jakarta dan Kabupaten Tangerang terlibat saling kecam setelah pemerintah kabupaten itu mengubah peruntukan tata ruang secara sepihak. Padahal Jakarta telah merencanakan tempat pembuangan regional di tempat itu. Pembebasan tanahnya telah dilakukan sejak 1997 Untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir Bantargebang di Bekasi, akan dioperasikan tiga TPST dalam kota. Ketiganya adalah TPST Cakung Cilincing yang beroperasi sejak 1 Agustus lalu, TPST Sunter yang September nanti akan dilelang untuk konsesi 25 tahun, dan TPST Marunda.

TPST Cakung Cilincing menerapkan teknologi mechanical biological treatment yang mengolah sampah anorganik dengan sistem daur ulang. Saat ini TPST di lahan 7,5 hektare itu menampung 400 ton sampah per hari dari kapasitasnya yang mencapai 1.300 ton. Kapasitas puncak itu setara dengan konversi bahan bakar gas 445.699 MMBTU. Berbeda dengan di Cakung Cilincing, TPST Sunter akan menggunakan teknologi insinerator. Adapun untuk TPST Marunda seluas 12 hektare masih menimbang-nimbang teknologinya

Bila ketiga TPST ini beroperasi, 4.500 ton sampah DKI Jakarta dapat dikelola sendiri. "Ini dapat mengurangi beban Bantargebang yang selama ini menampung 5.500 ton sampah DKI setiap hari hingga 10 tahun." Kepala Dinas Kebersihan Eko Bharuna mengatakan pembangunan TPST Sunter menggunakan skema kerja sama pemerintah daerah dan swasta (KPS) dalam pengadaan infrastruktur. Skema KPS dipilih lantaran lahan seluas 5 hektare di Sunter milik Pemerintah Provinsi.



